

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Studi mengenai perilaku politik kiai cukup penting untuk dikemukakan mengingat saat ini terjadi eskalasi keterlibatan kiai dalam sebuah agenda politik baik di pusat maupun di daerah. Keterlibatan yang dimaksud bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kiai saat ini dikenal sebagai gelar kemasyarakatan dalam tradisi Jawa khususnya, yang diberikan kepada seseorang yang dianggap memiliki pemahaman lebih mengenai ajaran Islam. Kiai di Jawa Barat dikenal dengan sebutan *ajengan*, di Jawa Tengah dan Jawa Timur istilah kiai itu biasanya diberikan kepada seseorang yang mengasuh pondok pesantren. Gelar kiai itu juga disematkan kepada ahli agama Islam meskipun dia tidak mengasuh pondok pesantren. Seseorang yang dijuluki kiai menjadi tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat dan mempunyai kedudukan tersendiri dalam sebuah struktur sosial. Biasanya seorang kiai memiliki *followers* (pengikut) dan dengan kedudukannya tersebut dia akan menjadi bahan rujukan bagi pengikutnya dalam segala hal, termasuk politik.

Sejarah mencatat bahwa sejak era perjuangan, kiai tidak pernah absen dalam kegiatan politik, faktanya adalah bahwa negeri Indonesia merdeka dengan keterlibatan para kiai. Sebut saja nama-nama seperti Syarif Hidayatullah, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, Imam Bondjol, Diponegoro dan lain-lain yang mendorong

berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain menyampaikan pemahaman agama, kiai-kiai tersebut juga menyampaikan pemahaman kenegaraan yang selalu berkorelasi antara keduanya.

Pada perkembangannya, perilaku politik seorang kiai mengalami perubahan peran tertentu dan peran kiai dalam sebuah pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dihindarkan. Kiai dengan para pengikutnya adalah sebagai basis sosial yang akan menjadi suatu basis politik yang dapat memberikan corak tersendiri dalam peta politik di daerah atau dalam sebuah proses demokratisasi lokal. Kiai dengan kharisma dan kemampuannya akan menjadi salah satu tokoh yang berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat terutama para pengikutnya. Dalam pemilihan kepala daerah, tidak jarang seorang kiai akan mempengaruhi pilihan politik pengikutnya dan cenderung mengarahkan pada salah satu kandidat.

Pondok pesantren sebagai balai pendidikan dengan dengan aktivitas yang begitu intens antara kiai beserta santrinya juga tidak terlepas dengan hiruk pikuk politik. Kedudukan seorang kiai yang mengasuh sebuah pesantren dianggap sangat potensial karena kiai dapat mempengaruhi santri, termasuk dalam urusan politik. Ummatin (dalam Wafa 2012: 64) menyebutkan bahwa pola hubungan kiai dan santri yang erat, merupakan faktor penting dan berpengaruh dalam menentukan pilihan politik. Hal ini didasarkan pada fakta hubungan santri dan kiai yang tidak hanya terbatas pada saat berada dalam dunia pesantren, namun terus berjalan tanpa mengalami keterputusan meskipun santrinya telah pulang ke rumah dan memiliki pesantren sendiri.

Pondok pesantren menjadi salah satu wadah bagi sebuah kelompok masyarakat untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan. Kiai sebagai pengasuh pesantren menjadi aktor utama dalam proses artikulasi kepentingan tersebut. Bagi para elite politik, kiai menjadi sarana untuk mendulang suara secara signifikan karena kiai di pondok pesantren memiliki basis yang nyata. Kiai memiliki peran yang beragam dalam politik, pada proses pemilihan umum misalnya, terdapat kiai yang terlibat secara langsung dengan masuk ke dalam sistem politik melalui parpol sehingga menjadi salah satu juru kampanye atau tim sukses dari pasangan calon yang didukung oleh partai politik yang bersangkutan.

Peran lainnya yaitu sebagai partisipan, yakni dengan hanya memberikan restu kepada pasangan calon tertentu. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi dari perkembangan pesantren dan karir kiai tersebut manakala calon yang diberikannya restu gagal dalam proses pemilihan umum. Tipe lain dari peran seorang kiai dalam proses pemilihan umum yaitu kiai yang tidak terlibat secara langsung namun mendukung berjalannya proses pemilihan umum. Dalam hal ini, kiai tidak memberikan satu dukungan tertentu pada satu calon dengan melakukan kampanye dan menjadi tim sukses salah satu calon, melainkan hanya memberikan doa restu kepada calon yang datang dan memohon doa restu kepada pesantren. Lebih lanjutnya dengan tidak hanya memberikan restu kepada salah satu calon saja, melainkan kepada calon lain yang juga datang dan memohon doa restu. Harapannya mereka dapat bersaing secara sehat dan memenuhi amanah kepada masyarakat.

Peran kiai beserta pondok pesantren dalam aktivitas politik menimbulkan opini pro dan kontra di masyarakat. Aktivitas politik di pesantren akan selalu menarik untuk dikaji karena pesantren menjadi salah satu entitas politik yang berpengaruh di Indonesia. Eric Hiariej (dalam Ernas, 2011: 73) mengatakan, *“pesantren is more politics than we think”* (pesantren lebih politik dari yang kita duga). Berdasarkan studinya Ernas menyimpulkan bahwa keterlibatan kiai dan pesantren dalam dunia politik menimbulkan berbagai implikasi diantaranya adalah delegitimasi peran pesantren sebagai otoritas moral dan referensi keagamaan. Selain itu juga timbul proses politik pragmatis-transaksional atas penukaran dukungan-dukungan politik dari pesantren dengan kompensasi yang akan diterima. Hal lain yang timbul adalah terjadinya resistensi masyarakat atas sikap politik pesantren. Persepsi sederhananya adalah bahwa politik adalah dunia yang dikenal kotor, maka kekhawatiran muncul manakala kiai dan pesantren terjun ke dalam dunia politik.

Pasca reformasi 1998, pintu gerbang dunia politik seolah terbuka luas bagi semua kalangan termasuk para kiai dan kaum santri. Reformasi 1998 seolah menjadi titik awal dimulainya panggung demokrasi di Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Tahun 2015 yang lalu tidak kurang dari 269 daerah yang

melaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara serentak (53% dari jumlah daerah di Indonesia). Pemilihan kepala daerah serentak tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, namun di beberapa daerah pelaksanaannya dilakukan pada awal bulan Februari 2017 karena beberapa alasan seperti kendala teknis, operasional, logistik dan anggaran.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 tersebut, peran kiai tidak bisa kita pungkiri kontribusinya. Jawa Timur menjadi saksi keterlibatan para kiai dan santri yang terlibat secara langsung sebagai aktor, sebagai calon, bahkan beberapa diantaranya memenangkan Pilkada. Chalik (2015: 374) menyebutkan beberapa kiai atau/nyai yang ikut pilkada dan sebagian memenangkannya adalah KH. Fathul Huda (Tuban), Nyai Hj. Kartika Hidayati (Lamongan), Drs. KH. Moch. Qosim (Gresik), KH. Syaefuddin (Sidoarjo), KH. Zakki Ghufrani dan KH. Hamid Wahid (Situbondo), KH. Busyro Karim dan Nyai Eva/Nur Khalifah (Sumenep), KH. Muqiet Arief (Jember). Beberapa nama lain juga dikenal dengan sebutan Gus/Lora/Bhindarah.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul menjadi salah satu daerah yang turut melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 terdapat dua pasangan calon yang bersaing yaitu Suharsono - Abdul Halim Muslih dan calon petahanan Sri Surya Widati - Misbakhul Munir. Sesuai dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU DIY pada tanggal 21 Desember 2015, pasangan Suharsono - Abdul Halim Muslih ditetapkan sebagai pemenang dengan

perolehan suara sebesar 260.834 suara (52,80%) sedangkan pasangan Sri Surya Widati - Misbakhul Munir memperoleh 233.196 suara (47,20%). Total suara sah sebanyak 493.239 suara, artinya Suharsono terpaut unggul 27.638 suara dari pesaingnya.

Pilkada Bantul tahun 2015 yang lalu memang sangat menarik, Sri Surya Widati yang dahulunya meneruskan estafeta kekuasaan dari suaminya sendiri Idham Samawi yang menjabat sebagai Bupati Bantul selama dua periode (1999-2004 dan 2005-2010) kini harus menyerahkan kekuasaannya kepada Suharsono - Halim. Politik dinasti yang terjadi selama beberapa periode belakangan ini di Kabupaten Bantul harus terputus pada pilkada serentak tahun 2015.

Pada masa Pilkada ini, berbagai macam isu dan opini muncul di tengah masyarakat Bantul, salah satunya adalah berita bahwa majunya Suharsono sebagai Calon Bupati Bantul adalah karena dimunculkan oleh partai pengusung pesaingnya sendiri yaitu PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Hal itu terjadi karena dikhawatirkan Pilkada Bantul 2015 ini akan diundur mengingat baru ada satu pasangan calon yang mendaftar, sementara saat itu belum ada regulasi mengenai calon tunggal. Pada akhirnya, di menit-menit akhir pendaftaran, Suharsono menggandeng Abdul Halim Muslih mendaftar ke KPUD Bantul untuk bersaing dalam Pilkada Bantul 2015.

Suharsono pada awalnya adalah seorang perwira polisi yang ikut mendaftar di Partai PDIP untuk maju dalam Pilkada Bantul 2015. Namanya masuk sebagai salah satu dari empat kandidat yang diseleksi oleh PDIP, selain Suharsono, nama-nama lainnya adalah Sudin, Untoro Hariadi (kader PDIP DIY), dan Sri Surya Widati (petahana). Dalam kegiatan seleksi itu seperti yang telah diberitakan oleh media harianjogja.com pada 8 Mei 2015, Suharsono melayangkan protes karena kegiatan seleksi itu dinilai tidak objektif dan melanggar kode etik karena Sri Surya Widati diwawancarai oleh suaminya sendiri yaitu Idham Samawi yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi. Sebelumnya Suharsono didukung oleh 14 Pengurus Anak Cabang PDIP sedangkan Sri didukung oleh 9 Pengurus Anak Cabang. Pada akhirnya PDIP memutuskan untuk mengukung Sri Surya Widati dengan didukung pula oleh Partai Nasdem, sementara Suharsono ditampung dan diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal yang menarik untuk dikaji adalah faktor yang mendukung atau menunjang bagi Suharsono beserta wakilnya Abdul Halim Muslih sehingga dapat mengalahkan petahana (incumbent). Suharsono lebih dikenal atas karirnya di kepolisian dan pangkat terakhirnya sebelum pensiun adalah Komisariss Besar Polisi (Kombespol). Abdul Halim Muslih sebagai wakilnya adalah orang yang berlatar belakang pesantren dan saat ini tercatat sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten bantul.

Kemanangan yang diperoleh Suharsono-Halim tentunya melibatkan peran dari berbagai pihak termasuk kemungkinan pesantren sebagai basis massa. Pesantren Al-Munawwir sendiri dikenal dengan kedekatan dan relasi politiknya dengan Partai PKB tempat Abdul Halim Muslih bernaung saat ini. Pesantren Al-Munawwir ini didirikan oleh KH. Munawwir pada tahun 1910 M. Kedekatannya dengan partai-partai Islam digambarkan dengan kiprah salah satu anak dari KH. Moenawwir yaitu KH. A. Warson Munawwir yang turut memprakarsai berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Yogyakarta.

Penulis memilih Al-Munawwir sebagai lokasi penelitian karena pesantren ini merupakan salah satu pesantren yang berpengaruh di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui keidentikan pesantren ini dengan partai PKB, maka pesantren Al-Munawwir menjadi objek penelitian yang sesuai mengingat pemenang Pilkada Bantul 2015 merupakan pasangan yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Timbul opini bahwa kemenangan Suharsono – Halim dipengaruhi atas kedekatan partai pengusungnya (PKB) dengan pesantren Al-Munawwir sebagai salah satu basis massa.

Literatur yang ada sebelumnya telah mengemukakan aneka pemaparan dan kesimpulan dengan cara yang berbeda dalam menjelaskan peran dan pengaruh elite agama Islam dalam suksesi pemilihan kepala daerah. Penelitian ini akan menjadi pelengkap dari literatur yang ada dengan mencoba untuk mencari tahu faktor yang mempengaruhi perilaku politik kiai di Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam pilkada Bantul tahun 2015.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku politik kiai Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015?”*

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku politik kiai di Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Pragmatis**

Diketuinya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik kiai di Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

#### **b. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap studi ilmu pemerintahan terutama mengenai dinamika politik lokal dalam proses pemilihan kepala daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam

mempelajari fenomena dan dinamika politik yang melibatkan elite politik dan elite agama.

#### **E. STUDI TERDAHULU (LITERATURE REVIEW)**

Kajian tentang dunia pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam dan salah satu rujukan keagamaan selalu memiliki sudut pandang tersendiri yang menarik untuk dikaji. Pesantren-pesantren yang hadir saat ini juga tidak terlepas dari dunia politik kekuasaan baik di tingkat lokal maupun nasional. Berbagai penelitian telah dilakukan di berbagai pondok pesantren modern maupun pesantren tradisional. Politik di pesantren tidak terlepas dari peran serta para kiai sebagai elite sosial dan para santri sebagai murid dan pengikut yang senantiasa mengabdikan kepada kiai yang menjadi guru dan orang tua ketika menuntut ilmu di pesantren.

Penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan di pondok pesantren menggunakan pendekatan teoritis yang berbeda-beda sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang beragam dan menjadi kontribusi referensi keilmuan politik Islam di Indonesia. Berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan di pondok pesantren diantaranya adalah:

**Tabel 1.1**  
**Literature Review**

NO	PENELITIAN	ISI KAJIAN
1.	Saidin Ernas, “Bias Politik Pesantren: Dari Pragmatisme-Transaksional Hingga Resistensi Sosial” Jurnal Studi Pemerintahan, Program Studi Filsafat IAIN Ambon, 2011.	<p>Terdapat 3 bentuk keterlibatan pesantren dalam dunia politik, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlibat secara langsung sebagai praktisi dan aktor politik yang terjun sebagai pengurus dan aktivis partai politik tertentu.</li> <li>2. Sebagai kekuatan pendukung partai politik tertentu dengan cara memberikan dukungan dibalik layar.</li> <li>3. Sebagai legitimasi politik yang sering dimanifestasikan dalam bentuk restu politik pada partai atau tokoh politik tertentu yang tidak berasal dari lingkungan pesantren.</li> </ol> <p>Keterlibatan pesantren di dunia politik yang semakin marak telah menimbulkan berbagai implikasi yang signifikan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan pesantren dalam politik secara nyata telah mendeligitimasi peran pesantren sebagai otoritas moral dan referensi keagamaan.</li> <li>2. Pesantren telah turut mengukuhkan politik pragmatis-transaksional, karena pesantren telah menjadikan politik sebagai ajang untuk mempertukarkan dukungan-dukungan politik dengan kompensasi yang diterima.</li> <li>3. Terjadi resistensi masyarakat atas sikap politik pesantren.</li> </ol>
2.	M. Dhuha Aniqul Wafa, “Peran Politik Kyai di Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 1994-2009”, Journal of Indonesian History, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri	Elite lokal saat ini tidak hanya menjadi milik para pejabat pemerintah, namun juga sudah disandangkan kepada para kiai. Hal ini dikarenakan seorang kiai memiliki basis masa dan pengikut yang lazimnya tunduk dan patuh terhadap titah dan fatwanya. Hal ini yang menjadi

	Semarang, 2012.	<p>alasan rasional bagi para elite politik untuk meminta dukungan dari seorang kiai.</p> <p>Peran kiai dalam penelitian ini disebutkan terbagi menjadi dua yaitu, kiai sebagai tokoh politik dan tokoh agama. Kiai sebagai tokoh agama melakukan pendidikan melalui madrasah dan pesantren. Kiai sebagai tokoh politik dibuktikan dengan banyaknya tokoh politik yang berasal dari partai politik yang berasaskan Islam seperti PKB dan PPP yang mengajak para kiai untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik. Melibatkan kiai dalam aktifitas politik dianggap dapat menjadi sarana untuk mendulang suara terutama bagi para pengikut kiai tersebut dan umumnya bagi masyarakat umum yang mengagumi kharismanya.</p> <p>Pada akhirnya kiai diasumsikan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dan para tokoh politik dalam melakukan dialog dan interaksi politik serta kiai berperan sebagai narahubung kebutuhan masyarakat.</p>
3.	Abdul Chalik, “Elite Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur”, Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2015.	<p>Menggunakan pendekatan Teori Powercube yang menjelaskan tentang konteks ruang (<i>spaces</i>) dalam Pilkada, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tertutup (<i>closed spaces</i>)</li> <li>2. Ruang yang diperkenankan (<i>invited spaces</i>)</li> <li>3. Ruang yang diciptakan (<i>claimed spaces</i>)</li> </ol> <p>Ruang tertutup dihuni oleh para politisi, elite atau mereka yang berkepentingan secara langsung dalam urusan politik. Istilah ruang tertutup ini juga dikenal dengan sebutan <i>shadow state</i> atau negara siluman. Dalam pilkada serentak tahun 2015 di Jawa Timur, <i>shadow state</i> atau ruang tertutup menjadi tempat bagi para elite lokal yang berbasis agama dan pesantren. Mereka tidak mewakili partai</p>

		<p>politik ataupun ormas, mereka menjadi kekuatan bayangan, kekuatan tersembunyi yang banyak bergerak di ruang tertutup dan tidak terendus oleh publik.</p> <p>Pada ruang yang diperkenankan (<i>invited spaces</i>) tidak ada yang dirahasiakan atau ditutupi, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengkritik dan memberikan saran yang seluas-luasnya.</p> <p>Ruang yang ketiga adalah ruang yang diciptakan (<i>claimed spaces</i>) yang merupakan gerakan sosial sebagai penyeimbang untuk mengontrol <i>closed</i> dan <i>invited spaces</i>.</p> <p>Pada konteks pilkada, elite lokal yang berbasis agama di Jawa Timur banyak bermain pada ruang terbuka dan tertutup. Pada ruang tertutup elite agama menjadi pendukung tidak langsung atau sebagai pendukung secara moral. Pada ruang terbuka, elite agama mengatasnamakan parpol atau ormas tertentu sebagai media sosialisasi atau secara personal menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu pasangan calon.</p>
4.	<p>Rudi Subiyakto, “Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)”, <i>Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan</i>, Vol. 1 No. 1 Tahun 2011</p>	<p>Rendahnya pendidikan masyarakat terutama di bagian pedalaman Banjarnegara menjadi salah satu faktor kemudahan dan keberhasilan seorang kiai menyetir atau mengarahkan masyarakat dalam berpolitik. Banjarnegara yang sebagian besar masyarakatnya berideologi NU menganggap bahwa seorang kiai terutama kiai dari NU lebih mengetahui pilihan terbaik politik lokal saat itu. Dalam kondisi seperti itu muncul istilah <i>sami’na wa atho’na</i> yang menandakan bahwa masyarakat “manut” atas pilihan politik kiai. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya pasangan Djasri-Soehardjo karena didukung oleh kiai sepuh dari NU.</p> <p>Lain halnya pasangan lain yang didukung oleh kiai dengan ideologi</p>

		<p>Muhammadiyah yang cenderung tidak kuasa memaksakan kehendak kepada masyarakat.</p> <p>Karakteristik kiai dalam pilkada terbagi menjadi tiga yaitu,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kiai yang berani terjun langsung ke gelanggang pilkada</li> <li>2. Kiai yang masih canggung dalam berpolitik</li> <li>3. Kiai yang secara kultural harus membebaskan dan menyerahkan sepenuhnya pilihan politik kepada masyarakat / kiai sebagai jembatan penghubung dengan masyarakat.</li> </ol>
5.	<p>Muhammad Aris Fahmi dkk, "Relasi Partai Politik dengan Basis Massa (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan dengan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.</p>	<p>Relasi yang terjalin antara partai politik dengan pondok pesantren dalam hal ini Partai Persatuan pembangunan (PPP) dengan Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang terjalin karena adanya kedekatan tokoh pesantren dengan tokoh partai. Relasi ini diawali atas adanya kesamaan ideologi partai dengan pesantren yang sama-sama menjunjung Ideologi Islam. Relasi yang dijalin pada dasarnya tidak mengatasnamakan pesantren, namun tidak lebih mengedepankan peran kiai di pesantren sebagai salah satu simpatisan partai atau atas kedekatan antara kiai dengan tokoh partai.</p> <p>Tidak bisa dipungkiri bahwa dibalik relasi tersebut terdapat sebuah kepentingan politik. Kepentingan bagi partai adalah bahwa pesantren memiliki basis masa yang nyata yang dengan kharismanya, seorang kiai menjadi rujukan pilihan politik keluarga besar pesantren. Kepentingan bagi pesantren adalah dengan terpilihnya pejabat yang direstui maka pesantren sedikit banyak akan mendapatkan tanda terimakasih baik fisik maupun non fisik. Secara fisik bisa terlihat dengan adanya bantuan pembangunan dari partai ataupun dari pejabat terpilih yang direstui. Secara non fisik, kiai terkadang dapat</p>

	<p>mempengaruhi kebijakan daerah. Hal ini terbukti dengan adanya permintaan pendapat kepada kiai atas kebijakan yang sedang dirancang. Proses tersebut tentu menjadi ideal karena kiai dapat memperjuangkan <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> dalam proses pembuatan kebijakan. Di sisi lain pejabat politik bisa mendapatkan masukan positif dari kiai sebagai salah satu referensi umat muslim sebelum menetapkan keputusan.</p> <p>Keuntungan lainnya adalah berjalannya proses pemilu dengan baik yang melibatkan kaum santri serta adanya harapan kemajuan pendidikan Islam di pesantren.</p>
--	---

Beberapa studi atau penelitian di atas menjadi salah satu rujukan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Masing-masing studi di atas dikaji dengan berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang beragam. Perbedaan yang terjadi bisa dikarenakan studi tersebut dikupas dengan teori yang berbeda, namun bisa juga disebabkan oleh realitas politik yang terjadi di lapangan.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Perilaku Politik**

#### **a. Definisi Perilaku Politik**

Perilaku dalam KBBI diartikan dengan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Jack Duncan (dalam Saptomo 2006: 16) menjelaskan bahwa perilaku merupakan komponen dalam sikap, yaitu komponen konasi yang merupakan kesiapan atau kecenderungan bagi suatu

jenis aksi tertentu yang berhubungan dengan obyek sikap sehingga perilaku sangat erat kaitannya dengan sikap. Jack P. Plome dan Helene dalam Hamid (2005: 14) mendefinisikan bahwa perilaku politik adalah pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga kegiatan-kegiatan yang nampak seperti pemungutan suara, gerak, kaukus dan kampanye.

Ramlan Surbakti mendefinisikan perilaku politik dengan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah, antara kelompok dan individu dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Perilaku politik tersebut merupakan aktivitas warga negara bukan pemerintahan, yang berupaya untuk merubah kebijakan pemerintah sebagai tuntutan politik yang sesuai dengan perkembangan politik dan perkembangan masyarakat. Perilaku yang bersifat politik bisa ditemui dalam setiap lingkungan kelembagaan (keluarga, perusahaan, tempat ibadah dan sebagainya).

Jack. C Plano menyebutkan bahwa perilaku politik seseorang adalah pikiran dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Perilaku politik ini meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes dan lobbying (Kusumawati, 2005: 12). Dengan beberapa pandangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa perilaku politik



adalah pola pikir, kegiatan, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya pembuatan, pelaksanaan dan penegakan suatu keputusan politik yang dapat diwujudkan dalam suatu pemerintahan atau sistem politik.

Perilaku politik dalam kehidupan di masyarakat memiliki arti yang sangat luas karena perilaku politik juga menyangkut bidang-bidang kehidupan lain yang sangat kompleks seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik itu sendiri. Sudijono Sastroatmodjo dalam Sudrajat menyebutkan bahwa perilaku politik itu ditentukan pula oleh identitas bersama yang dimiliki oleh masyarakat. Surbakti (1992: 44-47) menyebutkan bahwa faktor yang menjadi pembentuk identitas bersama khususnya di Indonesia yaitu primordial, sakral, personal, sejarah, Bhinneka Tunggal Ika, perkembangan ekonomi dan kelembagaan.

- 1). Faktor primordial merupakan keterkaitan seseorang dalam kelompok atas dasar ikatan kekerabatan, suku bangsa, kebhahasaan, kedaerahan dan adat istiadat sehingga melahirkan pola perilaku serta cita-cita yang sama. Artinya bahwa tidak jarang ketika seseorang mengekspresikan perilaku politiknya didasari oleh adanya kesamaan identitas tersebut.
- 2). Faktor sakral pada umumnya didasarkan karena keagamaan yang sama. Pluralitas dan corak agama pada faktor ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang. Dalam konteks penelitian ini, tidak jarang seorang kiai ataupun tokoh agama Islam lainnya menjadikan faktor keagamaan sebagai dasar pilihan politik karena adanya dogma agama yang sudah terkonsep sedemikian rupa dalam kitab suci yang

sakral. Dogma inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang.

- 3). Faktor personal biasanya disandarkan kepada seseorang yang ditokohkan atau dihormati. Dalam faktor ini, ekspresi perilaku politik seseorang dipengaruhi oleh perilaku politik orang lain. Sebagai contoh, perilaku politik seorang santri yang mengikuti perilaku seorang kiai atau ulama tertentu karena menganggap seseorang tersebut memiliki kemampuan atau pengetahuan yang lebih dalam bersikap dan berpolitik.
- 4). Faktor sejarah juga mempengaruhi terbentuknya identitas bersama. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti penderitaan yang sama yang disebabkan dengan penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antarkelompok masyarakat. Solidaritas, tekad dan tujuan yang sama itu dapat menjadi identitas yang dapat menimbulkan rasa dan konsep ke-kita-an dalam lingkungan sosial. Semua negara secara sadar pasti menciptakan dan memelihara simbol-simbol yang dapat membentuk persepsi yang sama tentang masa lalu seperti gedung bersejarah, museum bersejarah serta pernyataan dan ucapan yang bersejarah.
- 5). Bhineka Tunggal Ika. Faktor lain yang juga membentuk identitas bersama adalah adanya prinsip dan komitmen untuk bersatu dalam perbedaan. Setiap orang lumrahnya memiliki kesetiaan ganda (*multi loyalties*) sesuai dengan porsinya. Walaupun mereka memiliki keterikatan pada identitas

kelompok, namun mereka juga menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang berada dalam sebuah naungan negara yang sah.

- 6). Perkembangan Ekonomi melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap orang akan saling bergantung diantara berbagai jenis pekerjaan seiring dengan semakin tingginya mutu dan variasi kebutuhan masyarakat. Saling ketergantungan itu akan menciptakan solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Solidaritas tersebut disebut dengan solidaritas organis.
- 7). Faktor lain yang juga berperan dalam proses pembentukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik seperti birokrasi dan angkatan bersenjata dan partai politik. Birokrasi mempertemukan berbagai kepentingan dalam instansi pemerintah dengan berbagai kepentingan di kalangan penduduk sehingga tersusun suatu kepentingan nasional, watak kerja, dan pelayanannya yang impersonal. Angkatan bersenjata yang senantiasa memelihara dan mempertahankan keutuhan wilayah serta partai politik yang bersifat umum yang berperan menampung dan memadukan berbagai kepentingan masyarakat menjadi salah satu pilar kelembagaan yang membentuk adanya identitas kebersamaan.

#### **b. Model Perilaku Politik**

Surbakti (1992: 132) menyebutkan bahwa dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi kepribadian politik.

Adapun dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivitas politik dan individu warga negara biasa.

Agregasi ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan bangsa, sedangkan yang dimaksud dalam tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, machiavelist dan demokrat. Surbakti (1992) lebih lanjutnya menjelaskan model tentang empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga pendekatan di atas. Empat faktor yang dimaksud adalah:

- 1). Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa.
- 2). Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Dalam hal ini aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat termasuk nilai dan norma bernegara.
- 3). Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Terdapat tiga basis fungsional sikap yaitu:
  - a) Kepentingan, artinya penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut.
  - b) Penyesuaian diri, yaitu penilaian terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk sesuai atau selaras dengan objek tersebut.

c) Eksternalisasi dan pertahanan diri, yaitu penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh suatu keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idelaisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan *aggressor*.

4). Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

Hubungan sikap dan situasi ini bersifat *zero sum*, apabila faktor sikap yang menonjol maka faktor situasi kurang mengedepan, sebaliknya apabila situasi yang mengedepan maka faktor sikap kurang menonjol.

## **2. Partisipasi Politik**

Berkaitan dengan perilaku politik, maka teori tentang partisipasi politik menjadi salah satu teori yang mendukung penelitian ini terutama dalam hal penggalan informasi model dari perilaku politik itu sendiri. Dalam perilaku politik terdapat interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, antara lembaga pemerintah dan antara kelompok masyarakat. Interaksi di dalamnya mencakup pembahasan mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti: 1992).

Partisipasi politik itu sendiri berkaitan dengan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam menentukan segala keputusan politik yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Sederhananya, sebagai kata kunci bahwa perilaku politik itu merupakan sikap politik seseorang secara umum, sedangkan partisipasi politik biasanya dikaitkan dengan partisipasi dan peran seseorang dalam sebuah kontestasi politik seperti pemilihan kepala daerah yang pada akhirnya akan bermuara pada penentuan atau pembuatan keputusan politik. Di bawah ini akan dijelaskan definisi, faktor-faktor dan bentuk dari partisipasi politik.

#### **a. Definsi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik menurut Budiardjo (2010: 367) diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct actionnya*, dan sebagainya.

Ramlan Surbakti mendefinisikan bahwa partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Huntington dan Nelson

menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, semakin banyak partisipasi masyarakat dalam berpolitik maka akan semakin baik karena menunjukkan bahwa masyarakat mengerti dan memahami isu-isu politik sehingga ingin terlibat dalam proses politik. Begitu pula jika partisipasinya rendah maka terindikasikan bahwa pemahaman warga negara terhadap masalah politik terhitung rendah.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam segala upaya untuk mempengaruhi suatu keputusan politik baik itu dengan cara konvensional maupun non konvensional serta legal ataupun tidak legal.

#### **b. Faktor-faktor Partisipasi Politik**

Ramlan Surbakti (dalam Retnasari, 2013: 20-21) menyebutkan bahwa terdapat dua *variabel* yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang, yaitu:

- 1). Aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik), kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran terhadap hak dan kewajiban seperti hak politik, ekonomi, perlindungan hukum, dll.

- 2). Penilaian atau apresiasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahannya.

Selain itu terdapat juga faktor *bukan variabel* (independen) bahwa ada faktor lain seperti status sosial (status ekonomi), afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

Menurut Myron Weimer partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- 1). Modernisasi

Modernisasi akan berpengaruh kepada komensialisme pertanian, peningkatan arus urbanisasi, industri, pendidikan serta pengembangan media massa dan komunikasi lainnya secara luas.

- 2). Terjadi perubahan struktur kelas sosial

Perubahan ini disebabkan oleh terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru di era industri dan modernisasi

- 3). Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern

Munculnya ideologi seperti kapitalisme, liberalisme, nasionalisme dan lain-lain menjadi daya tarik sendiri untuk berpartisipasi dalam politik.

- 4). Konflik para elit politik

Para elit politik yang bersaing selalu berjuang untuk mendapat perhatian publik sehingga menstimulan adanya partisipasi politik



5). Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam sosial, budaya dan ekonomi

Faktor ini juga menimbulkan ketertarikan individu atau kelompok sehingga tertarik untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, seorang warga negara juga akan memiliki faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam partisipasi politiknya. Pertimbangan itu bisa dilihat juga dari kontrak politik yang akan disepakati meski tidak ada jaminan konsensus politik yang dikemukakan dapat dipenuhi oleh semua pihak. Seorang kiai biasanya akan memiliki faktor yang berkaitan dengan simbol agama Islam sebagai bahan pertimbangan walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat faktor lain yang jauh lebih dipertimbangkan.

### **c. Bentuk Partisipasi Politik**

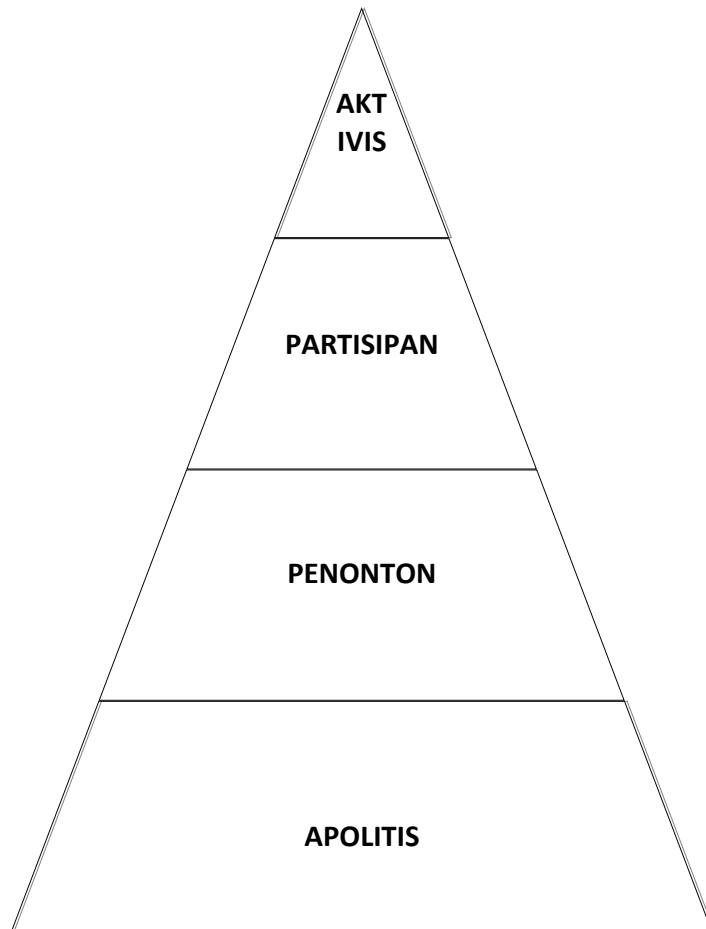
Almond (dalam Retnasari, 2013: 29) menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk partisipasi politik, yaitu:

- 1). Partisipasi politik konvensional
  - a) Pemberian suara atau voting
  - b) Diskusi politik
  - c) Kegiatan kampanye
  - d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

- e) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
- 2). Partisipasi politik non konvensional
- a) Pengajuan petisi
  - b) Demonstrasi
  - c) Konfrontasi
  - d) Mogok
  - e) Kekerasan politik terhadap harta benda (pengrusakan, pembakaran dll)
  - f) Kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, revolusi dll)

David F. Roth dan Frank L. Wilson (dalam Budiardjo, 2010: 373) menggambarkan partisipasi politik dalam sebuah paramida berdasarkan intensitasnya sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Piramida Partisipasi Politik**



Sumber: Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, ed. Revisi (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2010) hlm. 373.

Aktivis dalam gambar diatas adalah pejabat publik atau calon pejabat publik, Fungsiaris partai politik serta pimpinan kelompok kepentingan. Termasuk di dalamnya adalah pembunuh dengan motif politik, pembajak dan teroris. Di bawahnya yaitu partisipan dalam hal ini diantaranya orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat polistis serta orang yang terlibat dalam komunitas proyek. Dibawahnya terdapat kategori

penonton atau pengamat yaitu yang menghadiri reli-reli politik, anggota dalam kelompok kepentingan, pe-lobby, pemilih, orang yang terlibat dalam diskusi politik, serta pemerhati dalam pembangunan politik. Di tingkat paling bawah yaitu apolitis atau orang yang tidak mau terlibat dalam bentuk atau kegiatan politik apapun.

Partisipasi seorang kiai atau pemuka agama Islam dapat dikategorikan di salah satu dari empat kategori di atas. Satu individu kiai dengan individu lainnya sangat mungkin menempatkan diri dalam posisi atau kategori yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor atau pertimbangan tertentu yang mempengaruhi partisipasi politiknya.

### **3. Pondok Pesantren**

#### **a. Definisi Pondok Pesantren**

Pesantren hingga saat ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang eksistensinya tetap terjaga dan terus berkembang seiring kemajuan zaman. Subki (2013: 23) mendefinisikan pondok pesantren adalah tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji, biasanya kompleks itu berbentuk asrama atau kamar-kamar kecil dengan bangunan apa adanya yang menunjukkan kesederhanaannya.

Secara terminologis, pesantren didefinisikan oleh para ahli dengan definisi sebagai berikut:

- 1). Menurut Dhofier (1994: 84) pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.
- 2). Arifin (1991: 240) mendefinisikan pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) dimana menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan (*leadership*) seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik dan independen dalam segala hal.
- 3). Mastuhu (1994: 6) berpendapat bahwa pondok pesantren adalah lembaga tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam (*tafaqquh fi al-din*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup masyarakat sehari-hari.
- 4). Asrahah (1999: 59) menambahkan bahwa pesantren tradisional adalah jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya.

Melalui berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang kiai yang di dalamnya dilakukan proses

pembelajaran keilmuan agama Islam dalam upaya mempelajari, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari.

#### **b. Sejarah Pondok Pesantren**

Titik mulai sejarah pesantren hingga kini belum dapat dijelaskan dalam satu versi yang identik. Keabsahan sejarah dan dinamika sejarah pondok pesantren diceritakan dengan alur yang beragam. Istilah-istilah yang sering disebutkan dalam dunia kepesantrenan seperti kiai, santri, dan pesantren itu sendiri masih diperdebatkan. Pesantren menyimpan sisi historis yang begitu banyak sebagai saksi perkembangan sejarah Indonesia baik dalam hal sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Menurut Ensiklopedi Islam terdapat dua macam versi sejarah pesantren. Versi pertama menjelaskan bahwa pesantren berasal dari salah satu tradisi Islam yaitu tarekat, mengingat bahwa kaum sufi juga mempunyai keterikatan dengan pesantren. Dasar dari pendapat ini adalah tarekat merupakan kegiatan yang masyhur pada awal mula penyebaran agama Islam di Nusantara. Tarekat itu ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi tarekat yang mengamalkan zikir dan wirid tertentu. Organisasi tarekat itu dipimpin oleh seorang kiai yang mewajibkan anggota tarekat untuk melaksanakan *suluk*. *Suluk* adalah tinggal bersama-sama sesama anggota tarekat selama 40 hari bersama kiai dalam sebuah mesjid untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu di bawah bimbingan pemimpin tarekat (Dhofier, 1994: 34). Kiai biasanya memiliki kamar di sisi kiri dan kanan mesjid sebagai tempat menginap dan

memasak. Pada masa inilah dikenal dengan adanya istilah pengajian, yaitu dengan mengajarkan kitab-kitab agama yang kemudian lembaga pengajian tarekat ini dipercaya sebagai cikal bakal berdirinya lembaga pesantren.

Versi yang kedua menceritakan bahwa sistem pendidikan pesantren diadopsi dari sistem pendidikan Hindu di Nusantara. Argumentasinya bahwa faktanya lembaga pendidikan semisal dengan pesantren sudah ada jauh sebelum Islam datang ke Indonesia. Lembaga tersebut digunakan untuk mengajarkan ajaran agama Hindu dan mengkader para penyebar agama Hindu. Fakta lainnya tidak ditemukan lembaga seperti pesantren di negara-negara Islam sekalipun, namun bisa kita jumpai lembaga semisal pesantren di negara-negara Hindu dan Budha seperti India, Thailand dan Myanmar.

Perkembangan pesantren di Indonesia berkaitan erat dengan proses penyebaran agama Islam di Indonesia, maka perkembangan pesantren dapat dikelompokkan menjadi beberapa fase sebagai berikut:

- 1). Fase masuknya Islam ke Indonesia
- 2). Fase penjajahan Belanda
- 3). Fase penjajahan Jepang
- 4). Fase Indonesia merdeka

Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- 1). Fase Masuknya Islam ke Indonesia

Pada masa ini perkembangan dan kemajuan masyarakat Islam di Nusantara khususnya Jawa dan Madura tidak terlepas dengan adanya peran pesantren. Pesantren pada saat itu menjadi pusat perputaran roda ekonomi dan pengendalian politik Islam. Wahjoetomo (dalam Subki, 2013: 27) berpendapat bahwa tidaklah berlebihan jika kita menyebut pondok pesantren yang didirikan pertama kali adalah pondok pesantren milik Syekh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik). Sunan Gresik merupakan wali yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Beliau wafat pada tahun 822 H / 1419 M. Keterangan ini menunjukkan bahwa pesantren sudah ada sejak abad ke-15.

Pada perkembangannya, Raden Rahmat (Sunan Ampel) dianggap sebagai tokoh yang berhasil mengembangkan pesantren. Sebelum pindah ke Ampel Denta, Surabaya, Sunan Ampel mendirikan pesantren di Kembang Kuning. Namun misi keagamaan dan pendidikan Sunan Ampel baru terwujud setelah mendirikan pesantren di Ampel Denta sehingga dari titik itu muncullah pesantren-pesantren lainnya yang didirikan oleh para santrinya seperti Sunan Giri yang mendirikan pesantren Giri, Raden Fatah dengan pesantren Demaknya dan pesantren Tuban yang didirikan oleh Sunan Bonang.

Politik Islam pada saat itu juga mendapatkan kontribusi yang cukup besar dari pesantren, misalnya dalam hal pembentukan dan pengambilan berbagai kebijakan di kraton-kraton. Kontribusi pesantren itu dibuktikan dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak atas dukungan dan kontrol kuat dari para kiai seperti Sunan Kudus, Sunan Kalijaga dan sebagainya. (Asraha: 183).



## 2). Fase Penjajahan Belanda

Berkembang di tengah-tengah masyarakat urban seperti Surabaya (Ampel Delta), Gresik (Giri), Tuban (Sunan Bonang), Cirebon, Demak, Aceh, Banten dan Makassar menunjukkan bahwa pesantren merupakan suatu komunitas yang dinamis dan kosmopolit. Kedatangan penjajah Belanda ke Indonesia mengganggu proses dinamis dan kosmopolitannya pesantren karena Belanda menguasai kota-kota perdagangan sehingga membuat pesantren terdorong keluar dari kota-kota di pesisir ke pedalaman-pedalaman yang menutup diri dari kehidupan duniawi.

Terusirnya dari kota menjadikan pesantren lebih berfokus pada kegiatan dan permasalahan agama. Hal ini ditambah dengan maraknya proses westernisasi dan modernisasi yang dilakukan oleh penjajah Belanda sehingga pesantren semakin menjauh dari proses keduniawian dan cenderung menutup diri. Meskipun demikian, pesantren tidaklah menutup mata atas berbagai macam penindasan yang dilakukan oleh para penjajah Belanda kepada para pribumi sehingga pesantren menjadi salah satu basis massa yang ikut berkontribusi besar dalam upaya pengusiran penjajah Belanda dari Bumi Indonesia.

Westernisasi yang dilakukan para penjajah Belanda juga diterapkan pada sektor pendidikan, mereka menyelipkan misi kristenisasi untuk kepentingan Barat dan Nasrani dengan dalih pembaharuan pendidikan. Mereka menciptakan berbagai aturan untuk menyudutkan berbagai lembaga

pendidikan yang sudah ada terutama pesantren. Madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren yang tidak memiliki izin dari pemerintah Belanda ditutup serta kiai juga dilarang menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama kecuali atas izin mereka.

Dalam hal pendidikan, pesantren mengalami kemunduran pada masa ini karena fokus pendidikannya harus dibagi dengan aktivitas perlawanan. Upaya mengusir penjajah dari tanah air menjadi urgensi yang juga secara serius ditekuni oleh kalangan pesantren pada saat itu, bahkan pesantren menjadi basis massa yang secara vokal melakukan perlawanan dan menyatakan perang kepada para penjajah.

### 3). Fase Penjajahan Jepang

Jepang pada awal kedatangannya memberikan angin segar untuk Islam di Indonesia. Jepang mencanangkan berbagai kebijakan yang terlihat menguntungkan untuk umat muslim. *Voor Islamistische Saken* (kantor urusan agama pada masa Belanda) yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda kemudian diubah oleh Jepang menjadi kantor *Sumubi* dan dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Kiai (NU) sebagai organisasi Islam yang disegani penjajah saat itu.

Kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada Islam tersebut ternyata hanyalah sebagai siasat Jepang untuk menarik simpati masyarakat Islam untuk memanfaatkan kekuatan Islam dan nasionalis untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Kiai-kiai pada saat itu ditangkap karena membangkang dan

memberontak atas kesewenangan Jepang mengganti kegiatan sekolah dengan baris-berbaris dan latihan militer demi kepentingan mereka. Ruang gerak pesantren terus diawasi sehingga pesantren melakukan aktivitasnya di bawah tekanan. Meskipun demikian, tekanan itu tidak berlangsung lama karena Jepang kalah perang dari sekutu hingga akhirnya Soekarno - Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia.

#### 4). Fase Indonesia Merdeka

Lepasnya Indonesia dari belenggu penjajahan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pesantren untuk berbenah dan memperbaiki diri serta mengembangkan lembaganya yang pada masa penjajahan dibatasi oleh kekuasaan. Dinamisasi yang berbeda lahir pada fase ini dimana antara satu pesantren dengan pesantren yang lain terkadang memiliki ideologi yang berbeda. Dalam prosesnya setelah kemerdekaan, sebagian pesantren masih enggan untuk membuka diri dengan modernisasi dalam dunia pendidikan akibat trauma westernisasi Belanda.

Pesantren dalam model lainnya pada fase ini mulai membuka diri dan menerima arus modernisasi dengan penuh hati-hati. Secara perlahan pesantren mulai mengadopsi sistem pendidikan yang lebih terstruktur dengan kurikulum yang jelas selama itu sejalan dengan tujuan eksistensi dan kontinuitas pesantren. Bimbingan dan bantuan diberikan oleh pemerintah kepada pesantren sesuai dengan putusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang menyatakan bahwa “pengajaran yang bersifat pondok

pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain”.

Secara perlahan pemerintah mulai membina dan mengarahkan hingga momentum yang pas itu terwujud ketika KH. A. Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama. Melalui peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1950 diinstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah umum negeri dan swasta. Persaingan dengan madrasah modern dan sekolah-sekolah umum, mendorong pesantren-pesantren mengadopsi madrasah ke dalam pesantren (Asrahah, 1999: 189).

Dewasa ini pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan Islam semata. Pada perkembangannya, pesantren menjadi basis massa yang keberadaannya berpengaruh banyak dalam peta politik terutama dalam proses pemilihan pejabat publik. Pesantren saat ini bahkan menjadi identitas politik tertentu dari satu kelompok, yang ditandai dengan kedekatannya dengan salah satu partai politik atau bahkan dengan peran serta kiai pesantren yang maju dalam ranah politik praktis. Pesantren mewakili lembaga keislaman yang berpengaruh dalam pembangunan sosial umat Islam dan juga sebagai lembaga penting tempat kiai menjalankan kekuasaannya. Memang tidak semua kiai memiliki pesantren, namun kiai yang memiliki pesantren mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada kiai yang tidak memilikinya (Turmudi, 2004: 28-29).

#### 4. Definisi Kiai dan Santri

Sejarahnya kiai dalam bahasa Jawa digunakan untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu:

- a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat seperti “Kyai Garuda Kencana” yang dipakai untuk menyebut Kereta Emas di Keraton Yogyakarta.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kyai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang memiliki pengetahuan Islam secara dalam) (Dhofier, 1994: 55).

Kiai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren (Djamas, 2008: 55). Kiai merupakan istilah yang lebih umum dan merujuk kepada seorang muslim yang berpengetahuan. Di Indonesia, beberapa istilah lokal digunakan untuk menunjukkan berbagai tingkat kekiaian, dan istilah yang paling sering digunakan untuk merujuk tingkat kekiaian yang lebih tinggi adalah kiai (Turmudi, 2004: 29). Di Jawa Barat istilah kiai lebih familiar dikenal dengan sebutan *ajengan*, sedangkan istilah kiai di Jawa Tengah dan Jawa Timur familiar untuk kiai yang memimpin pesantren. Walaupun demikian, banyak kiai saat ini yang disebut dengan kiai kendati tidak memiliki pesantren. Dengan demikian dapat penulis

simpulkan bahwa kiai adalah seorang ahli ilmu agama Islam yang memiliki atau tidak memiliki pondok pesantren yang mengajarkan ajaran agama Islam kepada para santrinya. Seseorang yang berhak menyandang gelar kiai paling tidak harus memiliki empat komponen yaitu pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan (baik spiritual maupun biologis) dan moralitas. (Ronald Alan dalam Maarif, 2010: 281)

Manfred Ziemek berpendapat bahwa ada lima faktor yang menyebabkan seseorang menjadi kiai, yaitu:

- a. Berasal dari suatu keluarga kiai di lingkungannya agar dapat menggunakan kesetiaan kerabat dan masyarakatnya
- b. Sosialisasi dan proses pendidikannya dalam suatu pesantren terpadang yang dilengkapi dengan pengalaman dan latar belakang kepemimpinan yang telah ditanamkan
- c. Adanya kesiapan pribadi yang tinggi untuk bertugas, yakni kemauan untuk mengabdikan kehidupannya demi tugasnya di pesantren.
- d. Sebagai pemimpin agama dan masyarakat untuk bekerja secara sukarela guna membangun dan membiayai pesantren.
- e. Mampu mengumpulkan dana dan bantuan tanah wakaf dari warga yang mempunyai.

H.Aboebakar Atceh menambahkan persyaratan lain seorang kiai untuk dapat melihatkan kebesarannya yaitu: pengetahuannya, kesalehannya, keturunannya dan jumlah muridnya. (Ma'arif: 2010)

Para kiai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan simbol kealiman yaitu kopiah dan surban (Dhofier, 1994: 56). Dalam strukturnya di pesantren, kiai memiliki kekuasaan yang cukup absolut. Seorang kiai di pesantren begitu disegani karena doanya dianggap lebih *maqbul* sehingga tak jarang orang datang dan berguru di pesantrennya hanya untuk mendapatkan *barakah* yang dimiliki sang kiai.

Santri merupakan orang atau individu yang sedang atau telah menuntut ilmu di pesantren. Di bawah pimpinan seorang kiai di pesantren, santri dianggap sebagai orang yang taat dalam menjalankan agama Islam dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu keislaman yang didapatnya di pesantren. Santri secara tradisi terbagi menjadi dua bagian yaitu *santri mukim* dan *santri kalong*. Santri mukim adalah murid yang berasal dari daerah yang jauh dari letak pesantren sehingga dia tinggal menetap di dalam pesantren. Santri Kalong adalah murid-murid yang berasal dari daerah tempat pesantren itu berada dan biasanya mereka tidak menetap di dalam pesantren namun mereka mengikuti aktivitas-aktivitas di pesantren.

Baik santri mukim maupun santri kalong biasanya akan memiliki sikap hormat kepada kiai yang mengasuh dan mengajarnya di pesantren. Tidak jarang seorang santri bersifat *taklid* atau dalam bahasa Jawa disebut *manut* yang dalam artian mereka akan mematuhi perintah kiai meskipun tanpa mengetahui alasan kenapa kiai memerintahkan hal demikian. Begitu pula halnya dalam urusan politik, tidak jarang seorang santri yang dengan diperintahkan atau tanpa diperintahkan mereka akan mengikuti pilihan politik dari seorang kiai. Santri beranggapan bahwa kiai memiliki penalaran yang lebih dan sudah barang tentu beliau menentukan pilihan politiknya dengan nalar yang berbeda dengan orang awam pada biasanya. Inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa kiai memiliki peran dan pengaruh tertentu dalam proses pemilihan pejabat publik.

## **5. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 6 Tahun 2005). Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi salah satu proses demokratisasi lokal. Melalui pilkada tatanan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dianggap telah tercapai karena prosesnya berasal dari, oleh dan untuk rakyat.



Budiardjo (2010: 461) menyebutkan bahwa di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Meski demikian, pemilihan umum bukan merupakan satu-satunya tolak ukur sehingga perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masa persiapan dalam pilkada adalah:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
- d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Tahapan pelaksanaan pilkada adalah:

- a. Penetapan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
- c. Kampanye;
- d. Pemungutan suara;
- e. Penghitungan suara;
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Pilkada serentak telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia termasuk salah satunya di Kabupaten Bantul. Pilkada serentak mengemuka pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 2015) yang meski belum dijalankan namun kembali diubah dalam UU No. 8 Tahun 2015 yang perubahannya teknisional dimulai dari penyingkatan jangka waktu tahapan pilkada, penghapusan mekanisme uji publik, hingga penjadwalan ulang Pilkada Serentak (Aziz, 2016:164).

#### **G. Definisi Konsepsional**

1. Perilaku politik adalah pola pikir, kegiatan, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya pembuatan, pelaksanaan dan penegakan suatu keputusan politik yang dapat diwujudkan dalam suatu pemerintahan atau sistem politik.

2. Partisipasi politik adalah kegiatan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam segala upaya untuk mempengaruhi suatu keputusan politik baik itu dengan cara konvensional maupun non konvensional serta legal ataupun tidak legal.
3. Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang kiai yang di dalamnya dilakukan proses pembelajaran keilmuan agama Islam dalam upaya mempelajari, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari.
4. Kiai adalah seorang ahli ilmu agama Islam yang memiliki atau tidak memiliki pondok pesantren yang mengajarkan ajaran agama Islam kepada para santrinya.
5. Santri merupakan orang atau individu yang sedang atau telah menuntut ilmu di pesantren.
6. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan pegangan dalam melakukan penelitian. Definisi operasional yang dimaksudkan di sini adalah untuk memperjelas konsep yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti mengenai faktor pembentuk identitas bersama yang kemudian akan mempengaruhi perilaku politik yaitu:

1. Faktor primordial
  - a. Hubungan patron-klien
  - b. Persamaan bahasa
  - c. Persamaan kedaerahan
2. Faktor sakral
  - a. Ideologi keagamaan
  - b. Ideologi kenegaraan
3. Faktor personal
4. Faktor sejarah
5. Bhineka Tunggal Ika
6. Perkembangan Ekonomi
7. Kelembagaan

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong dalam Sarofah (2015: 29) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis cara kualifikasi lainnya. Penelitian

kualitatif mementingkan lebih banyak segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

Pendekatan kualitatif yang peneliti lakukan adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam mengenai perilaku politik kiai di Pondok Pesantren Al-Munawwir dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015. Penulis menganggap pendekatan ini relevan karena penelitian ini bersifat deskriptif apa adanya dari penelitian yang dilakukan.

## **2. Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Munawwir. Pesantren ini dipilih karena dianggap sebagai pesantren yang cukup berpengaruh di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di Kabupaten Bantul. Pesantren ini memiliki ribuan santri baik yang mukim maupun yang sudah menjadi alumni. Pesantren ini juga dinilai banyak terlibat dalam proses politik dan dikenal memiliki relasi dengan salah satu partai politik.

## **3. Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah informan atau responden yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Kiai di Pondok Pesantren Al-Munawwir Yogyakarta
- b. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul
- c. Sumber lain yang dijadikan rujukan narasumber saat penelitian

#### **4. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam melengkapi informasi pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan kiai di Pondok Pesantren Al-Munawwir yang memiliki hak pilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul tahun 2015. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait sebagai pendukung dan penyelenggara proses pemilihan umum. KPUD Bantul merupakan sumber data sekunder untuk mendapatkan informasi mengenai proses pemilihan bupati dan wakil bupati Bantul tahun 2015 secara komprehensif.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk mengumpulkan data yang akan mendukung proses penelitian. Melalui proses wawancara maka akan diketahui informasi-informasi faktual yang sesuai dengan tema penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai data yang dianggap relevan dan mendukung proses penelitian. Data ini didapatkan dengan membaca, mencatat dan menganalisis berbagai referensi

seperti buku, jurnal, media massa, artikel, skripsi, tesis dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

## **6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum, ketika dan setelah selesai di lapangan. Sebelum di lapangan, proses analisis dilakukan pada data-data sekunder yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian sementara dan masih bisa dikembangkan selama masa penelitian. Analisis di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan model Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2010) yaitu:

a. Pengumpulan data

Mengumpulkan informasi dari narasumber baik primer maupun sekunder

b. Reduksi data

Merangkum, memilih pokok informasi, memfokuskan, mencari tema dan pola serta mengesampingkan yang tidak diperlukan.

c. Penyajian data

Uraian singkat atas data yang didapatkan baik berupa narasi, bagan, maupun bentuk lainnya.

d. Penarikan kesimpulan

Menarik konklusi dari temuan di lapangan dalam reduksi ataupun penyajian data.

Dalam pendekatan kualitatif, objektivitas akan didapatkan dengan memberikan kesempatan kepada objek untuk menuturkan informasi dengan luas. Penuturan itu akan dianalisis sehingga temuan yang didapatkan diorganisir dan dikonstruksikan sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang diharapkan.